



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI WIDODO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **160796**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.986.000.000**

1. Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 166.000.000
2. Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 166.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 227.000.000
4. Tanah Seluas 3775 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 802.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/525 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 2.625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **152.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000



5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
17.500.000

6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

7. MOTOR, HONDA SCOOPY / SEPEDA MOTOR Tahun 2024,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.973.498.570

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.174.498.570

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.174.498.570

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.